Kapitalisme dan Politik Kesetaraan Gender di Indonesia: Antara Emansipasi Ekonomi dan Reproduksi Patriarki

Khulfi M. Khalwani[1*], Shaghi Ratu Sa'bani[2], Herlina Juni Risma Saragih[3], Yusuf Ali[4]
[1*] Biro Perencanaan, Kementerian Kehutanan RI
[2] Ekonomi Pertahanan, Universitas Pertahanan RI
[3,4] Program Studi Ilmu Pertahanan, Universitas Pertahanan RI
Corresponding Author's e-mail : khulfi.muhammad@kehutanan.go.id

SEIKAT
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 4886 - 4899

Available at:

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4231

DOI:

https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4231

Article History:

Received: 05-09-2026
Revised: 25-10-2026
Accepted: 26-10-2026

Abstract *: Women's economic participation in Indonesia has expanded through the labor market, micro, small, and medium enterprises (MSMEs), entrepreneurship, and the digital economy. However, this expansion has not fully translated into substantive gender equality, as women continue to face unequal reproductive work and persistent patriarchal norms. This study examines the relationship between capitalism and the politics of gender equality in Indonesia by positioning economic emancipation and the reproduction of patriarchy as two simultaneous processes. It employs a qualitative approach through library research and thematic analysis of literature on capitalism, gender political economy, reproductive work, women's empowerment, entrepreneurship, and gender development in Indonesia. The findings indicate that capitalism has an ambivalent relationship with women's emancipation. On the one hand, it creates opportunities for women to earn income, develop businesses, and expand their participation in the public sphere. On the other hand, women's integration into the market occurs alongside the persistence of reproductive work, which remains largely privatized within households and disproportionately assigned to women. This creates a paradox in which economic emancipation can coexist with the reproduction of patriarchy. Substantive gender equality therefore requires a transformation of power relations, recognition and redistribution of reproductive work, stronger care-economy policies, and women's empowerment policies that move beyond market integration alone*

Keywords *: capitalism; gender equality; economic emancipation; patriarchy; reproductive work; Indonesia*

Abstrak : Partisipasi ekonomi perempuan di Indonesia terus berkembang melalui pasar kerja, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kewirausahaan, serta ekonomi digital. Namun, peningkatan partisipasi tersebut belum sepenuhnya menghasilkan kesetaraan gender substantif karena perempuan masih menghadapi pembagian kerja reproduktif yang tidak setara dan norma patriarkal. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara kapitalisme dan politik kesetaraan gender di Indonesia dengan menempatkan emansipasi ekonomi dan reproduksi patriarki sebagai dua proses yang berlangsung secara simultan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) dan analisis tematik terhadap literatur mengenai kapitalisme, ekonomi politik gender, kerja reproduktif, pemberdayaan perempuan, kewirausahaan, dan pembangunan gender di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa kapitalisme memiliki karakter ambivalen terhadap emansipasi perempuan. Di satu sisi, kapitalisme membuka ruang bagi perempuan untuk memperoleh pendapatan, membangun usaha, dan memperluas partisipasi publik. Di sisi lain, integrasi perempuan ke dalam pasar berlangsung bersamaan dengan keberlanjutan kerja reproduktif yang sebagian besar diprivatisasi dalam rumah tangga dan dibebankan kepada perempuan. Kondisi tersebut menghasilkan paradoks ketika emansipasi ekonomi berjalan bersamaan dengan reproduksi patriarki. Kesetaraan gender substantif karena itu membutuhkan

transformasi relasi kuasa, pengakuan dan redistribusi kerja reproduktif, penguatan care economy, serta kebijakan pemberdayaan yang melampaui sekadar integrasi perempuan ke dalam pasar.

Kata Kunci: kapitalisme; kesetaraan gender; emansipasi ekonomi; patriarki; kerja reproduktif; Indonesia

PENDAHULUAN

Transformasi ekonomi Indonesia dalam dua dekade terakhir telah membuka ruang yang semakin luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Perempuan tidak lagi hanya ditempatkan dalam ruang domestik, tetapi semakin hadir sebagai pekerja, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), entrepreneur, serta aktor dalam ekonomi digital. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya proses emansipasi ekonomi perempuan melalui peningkatan akses terhadap pekerjaan, pendapatan, kewirausahaan, dan ruang publik. Sejumlah penelitian bahkan menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional (Firmansyah & Sihaloho, 2021; Setyaningrum et al., 2023; Sulisto et al., 2023). Namun, meningkatnya partisipasi ekonomi perempuan belum serta-merta menunjukkan tercapainya kesetaraan gender substantif.

Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan masih kuatnya kesenjangan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam pasar kerja Indonesia. Berdasarkan Sakernas Agustus 2025, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan mencapai 56,63%, sedangkan TPAK laki-laki mencapai 84,40%. Dengan demikian, terdapat kesenjangan sebesar 27,77 poin persentase antara perempuan dan laki-laki (BPS, 2025). Meskipun TPAK perempuan meningkat dibandingkan Agustus 2024 yang sebesar 56,42%, kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa perluasan partisipasi ekonomi perempuan belum menghapus diferensiasi gender dalam pasar kerja. Fakta ini menjadi penting karena perempuan semakin didorong untuk masuk ke ruang produktif, sementara struktur sosial yang mengatur pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan belum sepenuhnya berubah.

Persoalan tersebut menjadi lebih kompleks ketika emansipasi ekonomi perempuan berlangsung dalam struktur kapitalisme yang masih berkelindan dengan pembagian kerja berbasis gender. Kapitalisme tidak hanya membutuhkan tenaga kerja untuk proses produksi, tetapi juga membutuhkan proses reproduksi sosial yang memungkinkan tenaga kerja tersedia dan dapat bekerja secara berkelanjutan. Pengasuhan anak, pekerjaan rumah tangga, memasak, membersihkan rumah, serta merawat anggota keluarga merupakan aktivitas yang menopang kehidupan ekonomi, tetapi sebagian besar dilakukan tanpa kompensasi dan pengakuan ekonomi yang sebanding. Studi (Acker, 2004) menunjukkan bahwa kapitalisme dan relasi gender merupakan struktur yang saling berkelindan, sehingga organisasi ekonomi dan pasar kerja tidak dapat dipahami sebagai ruang yang netral gender. Dalam perspektif sejarah sosial kapitalisme, rumah tangga dan kerja domestik juga merupakan bagian penting dari proses reproduksi sosial yang menopang keberlangsungan sistem ekonomi (Boris & Swinth, 2023).

Dalam konteks Indonesia, paradoks tersebut terlihat ketika meningkatnya tuntutan terhadap produktivitas perempuan tidak selalu diikuti dengan redistribusi tanggung jawab reproduktif di dalam rumah tangga maupun masyarakat. Analisa (Cameron, 2023) menunjukkan bahwa norma sosial di Indonesia masih menempatkan perempuan sebagai pengasuh utama dalam keluarga. Akibatnya, perempuan yang memasuki pasar kerja tetap menghadapi tanggung jawab domestik dan pengasuhan yang besar. Situasi ini menghasilkan beban ganda (*double burden*), yaitu ketika perempuan menjalankan kerja produktif untuk memperoleh pendapatan sekaligus menjalankan kerja reproduktif yang sebagian besar tidak dibayar. Dengan demikian, persoalan kesetaraan gender tidak hanya berkaitan dengan akses perempuan terhadap pekerjaan, tetapi juga

dengan bagaimana waktu, beban, pendapatan, perlindungan sosial, dan kesempatan untuk memperoleh posisi strategis didistribusikan antara perempuan dan laki-laki.

Kondisi tersebut membawa persoalan pada cara pemberdayaan perempuan dipahami dalam agenda pembangunan. Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan kesetaraan gender, termasuk Pengarusutamaan Gender (PUG), pemberdayaan ekonomi perempuan, serta agenda Sustainable Development Goals (SDGs) yang menempatkan kesetaraan gender sebagai salah satu tujuan pembangunan. Kesetaraan gender juga telah menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional (Siscawati et al., 2020). Namun, studi (Cornwall & Rivas, 2015) mengkritik kecenderungan menjadikan konsep *women's empowerment* sebagai instrumen peningkatan produktivitas dan partisipasi ekonomi tanpa diikuti perubahan terhadap struktur ketidakadilan. Dalam kerangka tersebut, perempuan dapat menjadi semakin produktif dan semakin terintegrasi ke dalam pasar, tetapi belum tentu memperoleh peningkatan kekuasaan yang sebanding dalam rumah tangga, tempat kerja, maupun proses pengambilan keputusan publik.

Dalam konteks kebijakan Indonesia, kesenjangan antara emansipasi ekonomi dan transformasi relasi gender juga terlihat dalam implementasi Pengarusutamaan Gender. Temuan (Eko Hartono & Khalwani, 2022) menunjukkan bahwa penerapan PUG telah menghasilkan inovasi dalam perencanaan dan tata kelola pembangunan, tetapi masih menghadapi hambatan kelembagaan dan budaya organisasi. Pada tingkat pembangunan desa, (Syukri, 2023) menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan partisipatif dapat tetap lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dibandingkan transformasi relasi gender. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan yang mendorong partisipasi perempuan belum tentu mengubah struktur sosial yang menentukan pembagian kerja, akses terhadap sumber daya, serta posisi perempuan dalam pengambilan keputusan.

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan ketika entrepreneurship perempuan dipromosikan sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi. Di Indonesia, perempuan memiliki kontribusi penting dalam UMKM dan aktivitas kewirausahaan, tetapi masih menghadapi keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, jaringan, dan sumber daya produktif (Setyaningrum et al., 2023; Susanti et al., 2023). Pada tingkat yang lebih luas, agenda kewirausahaan perempuan juga perlu dilihat secara kritis karena dapat menggeser tanggung jawab pemberdayaan dari perubahan struktural menuju tanggung jawab individual perempuan untuk menjadi lebih produktif dan kompetitif.

Berdasarkan uraian tersebut, persoalan utama tulisan ini bukan mempertentangkan apakah perempuan perlu berpartisipasi dalam ekonomi, melainkan mempertanyakan apakah peningkatan partisipasi tersebut telah menghasilkan emansipasi yang substantif. Jika perempuan semakin didorong untuk bekerja, berwirausaha, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi pada saat yang sama tetap memikul sebagian besar kerja reproduktif, maka terdapat paradoks dalam proses emansipasi tersebut. Kapitalisme dapat membuka ruang bagi perempuan untuk memasuki sektor produktif, tetapi pada saat yang sama dapat tetap memperoleh manfaat dari kerja reproduktif yang tidak dibayar. Dengan demikian, reproduksi patriarki tidak harus dipahami sebagai sesuatu yang berada di luar sistem ekonomi, tetapi sebagai salah satu mekanisme sosial yang dapat menopang keberlangsungan struktur ekonomi tersebut (Acker, 2004; Boris & Swinth, 2023).

Dengan menggunakan perspektif ekonomi politik gender, tulisan ini bertujuan menjelaskan paradoks tersebut serta menunjukkan bahwa agenda kesetaraan gender perlu bergerak melampaui peningkatan partisipasi ekonomi menuju transformasi relasi kuasa, pengakuan terhadap kerja

reproduktif, redistribusi tanggung jawab perawatan, dan perubahan struktur sosial yang menopang ketimpangan gender.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) untuk menganalisis hubungan antara kapitalisme, emansipasi ekonomi perempuan, dan reproduksi patriarki dalam konteks kesetaraan gender di Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk menginterpretasikan gagasan teoritis dan temuan penelitian mengenai relasi antara struktur ekonomi, gender, dan kekuasaan.

Sumber data penelitian berupa literatur ilmiah yang relevan dengan tema kapitalisme, ekonomi politik gender, kesetaraan gender, kerja reproduktif, pemberdayaan perempuan, kewirausahaan perempuan, dan pembangunan gender di Indonesia. Literatur utama terdiri atas artikel-artikel ilmiah yang telah digunakan dalam penyusunan naskah, antara lain hubungan gender, kapitalisme, dan globalisasi (Acker, 2004), rumah tangga dan sejarah sosial kapitalisme (Boris & Swinth, 2023), kritik terhadap pendekatan *women's empowerment* (Cornwall & Rivas, 2015), kesetaraan gender dan pembangunan di Indonesia (Cameron, 2023), posisi perempuan dalam perekonomian Indonesia (Miranti et al., 2022), serta berbagai penelitian mengenai pemberdayaan perempuan, UMKM, kewirausahaan, pengarusutamaan gender, dan pembangunan ekonomi Indonesia (Eko Hartono & Khalwani, 2022; Firmansyah & Sihaloho, 2021; Setyaningrum et al., 2023; Siscawati et al., 2020; Sulisto et al., 2023; Susanti et al., 2023; Syukri, 2023).

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan seleksi literatur berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian. Literatur kemudian dikelompokkan ke dalam tema kapitalisme dan relasi gender, emansipasi ekonomi perempuan, kerja produktif dan reproduktif, patriarki dan beban ganda, kebijakan kesetaraan gender, serta kewirausahaan perempuan.

Analisis dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, membandingkan, dan mensintesiskan konsep serta temuan dari berbagai sumber. Analisis diarahkan untuk mengidentifikasi pola hubungan antara peningkatan partisipasi ekonomi perempuan dan keberlanjutan struktur patriarkal. Sintesis tersebut digunakan untuk menjelaskan paradoks ketika emansipasi ekonomi perempuan berlangsung bersamaan dengan reproduksi patriarki, serta untuk memahami kesetaraan gender sebagai persoalan distribusi sumber daya, kekuasaan, dan tanggung jawab reproduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kapitalisme dan Emansipasi Ekonomi Perempuan di Indonesia

Perubahan struktur ekonomi Indonesia telah menciptakan ruang yang semakin luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam aktivitas produktif. Perempuan tidak lagi hanya ditempatkan dalam ruang domestik, tetapi semakin terlibat dalam pasar tenaga kerja, UMKM, kewirausahaan, dan ekonomi digital. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi kapitalistik memiliki dimensi emansipatoris karena membuka peluang bagi perempuan untuk memperoleh pendapatan, mengembangkan kapasitas ekonomi, dan memasuki ruang publik yang sebelumnya lebih banyak didominasi laki-laki. Temuan mengenai hubungan positif antara pemberdayaan perempuan dan pertumbuhan ekonomi memperkuat pandangan bahwa perempuan merupakan aktor ekonomi, bukan sekadar kelompok penerima manfaat pembangunan (Firmansyah & Sihaloho, 2021; Sulisto et al., 2023).

Dalam konteks UMKM, posisi perempuan juga semakin strategis. Studi empiris oleh (Tambunan, 2019) menunjukkan pentingnya UMKM dalam struktur perekonomian Indonesia,

sementara penelitian (Setyaningrum et al., 2023) menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam aktivitas entrepreneurship dan pertumbuhan ekonomi. Selaras dengan itu, temuan (Susanti et al., 2023) juga menunjukkan bahwa perempuan pemilik UMKM berkontribusi terhadap daya saing usaha, meskipun masih menghadapi keterbatasan dalam akses terhadap modal, teknologi, inovasi, dan sumber daya produktif. Dengan demikian, integrasi perempuan ke dalam ekonomi pasar menghasilkan peluang nyata bagi peningkatan kemandirian ekonomi.

Namun, emansipasi ekonomi tersebut memiliki batas struktural. Peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi tidak selalu diikuti dengan redistribusi kekuasaan ekonomi yang setara. Perempuan masih banyak terkonsentrasi pada sektor informal, pekerjaan rentan, dan usaha berskala kecil. Dengan kata lain, pasar memang membuka pintu bagi perempuan, tetapi posisi perempuan di dalam pasar belum sepenuhnya setara. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap pasar tidak identik dengan kesetaraan dalam struktur ekonomi.

Persoalan tersebut dapat dipahami melalui perspektif Acker (2004) yang melihat hubungan antara kapitalisme dan gender sebagai relasi yang saling berkelindan. Struktur ekonomi tidak bersifat netral gender karena organisasi kerja, pembagian pekerjaan, dan distribusi kesempatan ekonomi dibentuk oleh relasi sosial yang membedakan posisi perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu, masuknya perempuan ke dalam pasar tidak dapat secara otomatis dipahami sebagai akhir dari subordinasi gender. Emansipasi ekonomi hanya menjadi emansipasi substantif apabila peningkatan akses terhadap aktivitas produktif juga disertai perubahan dalam distribusi kekuasaan, sumber daya, dan tanggung jawab sosial.

Perspektif tersebut dapat diperluas dengan melihat bahwa ketimpangan gender tidak berdiri sebagai struktur yang sepenuhnya terpisah dari kapitalisme. Studi (Bieler & Morton, 2025) menunjukkan bahwa kelas, patriarki, dan ras dapat dipahami sebagai relasi yang saling berkelindan dalam reproduksi kapitalisme. Dengan demikian, subordinasi perempuan tidak hanya merupakan persoalan distribusi kesempatan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga berkaitan dengan struktur sosial yang lebih luas yang menentukan bagaimana kekuasaan, sumber daya, dan posisi dalam ekonomi didistribusikan.

Kerja Reproduktif dan Reproduksi Patriarki

Salah satu temuan utama kajian ini adalah bahwa emansipasi ekonomi perempuan berlangsung bersamaan dengan keberlanjutan kerja reproduktif. Kerja produktif mencakup aktivitas yang menghasilkan pendapatan dan secara langsung diakui oleh pasar, sedangkan kerja reproduktif mencakup pengasuhan anak, pekerjaan rumah tangga, memasak, membersihkan rumah, dan merawat anggota keluarga. Meskipun kerja reproduktif merupakan prasyarat bagi keberlangsungan kehidupan dan tenaga kerja, aktivitas tersebut sebagian besar berlangsung di luar mekanisme remunerasi pasar.

Menurut (Boris & Swinth, 2023) kedudukan sebuah rumah tangga sangat penting dalam sejarah sosial kapitalisme. Rumah tangga bukan sekadar ruang privat yang terpisah dari sistem ekonomi, melainkan bagian dari proses yang memungkinkan keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi. Dalam konteks tersebut, kerja domestik mempunyai fungsi ekonomi meskipun tidak selalu terlihat dalam indikator ekonomi formal. Tenaga kerja yang hadir di pasar setiap hari membutuhkan proses perawatan, pengasuhan, makanan, kebersihan, dan reproduksi sosial yang berlangsung di luar pasar.

Di Indonesia, proses tersebut memiliki dimensi gender yang kuat. Studi (Cameron, 2023) menunjukkan bahwa norma sosial masih menempatkan perempuan sebagai pengasuh utama dalam rumah tangga. Ketika perempuan memasuki pasar kerja, tanggung jawab domestik tidak otomatis berpindah kepada laki-laki, negara, atau penyedia layanan perawatan. Akibatnya,

perempuan harus menggabungkan dua jenis pekerjaan sekaligus, yaitu pekerjaan produktif yang menghasilkan pendapatan dan pekerjaan reproduktif yang sebagian besar tidak dibayar. Situasi ini menghasilkan beban ganda (*double burden*). Beban ganda bukan sekadar persoalan banyaknya aktivitas yang harus dilakukan perempuan, tetapi menunjukkan adanya ketidakseimbangan struktural dalam distribusi waktu dan tanggung jawab. Perempuan yang bekerja memperoleh posisi sebagai pekerja atau entrepreneur, tetapi tetap diharapkan menjalankan fungsi domestik sebagai ibu, istri, dan caregiver. Akibatnya, peningkatan partisipasi ekonomi dapat berlangsung tanpa pengurangan beban reproduktif.

Pandemi COVID-19 memperjelas mekanisme tersebut. Temuan (Miranti et al., 2022) menunjukkan bahwa perempuan menghadapi tekanan ekonomi dan sosial yang lebih besar selama pandemi, termasuk kehilangan pekerjaan, perpindahan ke sektor informal, serta peningkatan tanggung jawab domestik dan perawatan keluarga. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa ketika sistem ekonomi mengalami krisis, sebagian biaya reproduksi sosial dikembalikan kepada rumah tangga dan terutama perempuan. Dalam perspektif ekonomi politik, kondisi ini dapat dibaca sebagai bentuk subsidi sosial yang tidak terlihat. Negara dan pasar memperoleh manfaat dari tersedianya tenaga kerja yang dapat berproduksi, sementara sebagian biaya untuk mempertahankan dan mereproduksi tenaga kerja ditanggung oleh rumah tangga. Ketika kerja reproduktif dilakukan tanpa pembayaran dan tanpa perlindungan sosial yang memadai, biaya tersebut secara tidak proporsional ditanggung perempuan. Dengan demikian, reproduksi patriarki tidak semata-mata merupakan persoalan budaya, tetapi dapat berinteraksi dengan struktur ekonomi dalam mempertahankan pembagian kerja yang tidak setara.

Politik Pemberdayaan Perempuan: Antara Pasar dan Transformasi Gender

Indonesia telah menjadikan kesetaraan gender sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional. Pengarusutamaan Gender (PUG), pemberdayaan ekonomi perempuan, serta agenda SDGs menunjukkan adanya pengakuan formal terhadap pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan. Agenda kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan telah menjadi bagian dari pembangunan nasional Indonesia. Arah kebijakan tersebut menunjukkan perkembangan penting dalam pengakuan terhadap posisi perempuan sebagai subjek pembangunan (Siscawati et al., 2020).

Masalah utama terletak pada cara dalam mengartikan dan menjalankan pemberdayaan wanita selama ini. Menurut (Cornwall & Rivas, 2015), agenda pemberdayaan perempuan sering kali terlalu fokus pada produktivitas ekonomi. Akibatnya, pemberdayaan dapat kehilangan makna transformatif ketika perempuan terutama dipandang sebagai sumber daya ekonomi yang perlu ditingkatkan kapasitasnya agar lebih produktif di pasar.

Dalam konteks Indonesia, kecenderungan tersebut terlihat ketika keberhasilan pemberdayaan perempuan sering dihubungkan dengan meningkatnya partisipasi ekonomi, jumlah usaha perempuan, pendapatan, atau akses terhadap kegiatan produktif. Indikator tersebut penting, tetapi belum cukup untuk menunjukkan perubahan relasi kuasa. Perempuan dapat memiliki usaha sendiri, memperoleh pendapatan, atau memasuki pekerjaan formal, tetapi tetap tidak memiliki posisi tawar yang sama dalam rumah tangga maupun institusi ekonomi dan politik.

Hasil penelitian (Eko Hartono & Khalwani, 2022) menunjukkan bahwa implementasi PUG di lingkungan birokrasi telah menghasilkan inovasi kelembagaan, tetapi masih menghadapi hambatan budaya organisasi dan kapasitas kelembagaan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan gender dapat hadir secara formal tanpa sepenuhnya mengubah struktur organisasi dan relasi kekuasaan yang telah terbentuk.

Fenomena serupa terlihat dalam pembangunan desa. Studi (Syukri, 2023) menunjukkan bahwa pembangunan partisipatif di Indonesia dapat lebih menekankan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dibandingkan transformasi relasi gender. Artinya, partisipasi perempuan dapat meningkat tanpa secara otomatis menghasilkan perubahan dalam pembagian kekuasaan dan tanggung jawab.

Di sisi lain, keterlibatan perempuan dalam ruang politik memiliki arti penting bagi transformasi tersebut. Temuan (Dahlum et al., 2022) menunjukkan adanya hubungan antara pemberdayaan politik perempuan dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender tidak seharusnya dipersempit menjadi isu ketenagakerjaan atau pendapatan. Representasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan juga merupakan bagian penting dari kemampuan perempuan untuk memengaruhi kebijakan yang menentukan distribusi sumber daya dan tanggung jawab sosial.

Temuan empiris di Indonesia juga menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan memiliki hubungan yang berbeda-beda dengan pembangunan perempuan. Hasil analisis (Yunara et al., 2023) pada data panel 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat, menemukan bahwa proporsi tenaga profesional perempuan dan kontribusi pendapatan perempuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan perempuan. Sebaliknya, proporsi pengusaha perempuan menunjukkan pengaruh negatif yang tidak signifikan, sedangkan keterwakilan perempuan di parlemen menunjukkan pengaruh positif tetapi tidak signifikan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan tidak dapat dipahami hanya dari keberadaan perempuan dalam aktivitas ekonomi atau politik, tetapi perlu dilihat dari kualitas dan posisi strategis partisipasi tersebut dalam meningkatkan pembangunan perempuan.

Dengan demikian, politik pemberdayaan perempuan berada di antara dua orientasi. Orientasi pertama menempatkan perempuan sebagai **aktor ekonomi yang harus diintegrasikan ke pasar**, sedangkan orientasi kedua menempatkan perempuan sebagai **subjek politik yang memiliki hak untuk mengubah struktur yang menghasilkan ketimpangan**. Perbedaan orientasi tersebut sangat penting karena pemberdayaan yang hanya berorientasi pasar berisiko memperluas tanggung jawab perempuan tanpa mengurangi struktur ketidaksetaraan yang mereka hadapi.

Entrepreneurship Perempuan dan Logika Neoliberal

Penelitian (Setyaningrum et al., 2023) menunjukkan pentingnya perempuan dan entrepreneurship bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Analisa (Susanti et al., 2023) juga menunjukkan bahwa UMKM perempuan memiliki potensi dalam membangun kinerja dan keunggulan kompetitif, termasuk melalui transformasi digital. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa entrepreneurship dapat menjadi arena penting bagi emansipasi ekonomi perempuan.

Paradoks muncul saat kewirausahaan dijadikan solusi utama ketimpangan ekonomi perempuan. Menurut (Roberts & Mir Zulfiqar, 2019), program entrepreneurship perempuan dapat berkelindan dengan logika pembangunan neoliberal yang menempatkan individu sebagai pihak yang bertanggung jawab atas peningkatan kesejahteraannya sendiri. Perempuan didorong untuk menjadi lebih mandiri, inovatif, produktif, dan kompetitif, sementara persoalan struktural seperti keterbatasan akses terhadap modal, perlindungan sosial, infrastruktur perawatan, dan pembagian kerja domestik tidak selalu mendapatkan perhatian yang sama.

Kritik terhadap kecenderungan tersebut juga terlihat dalam kajian mengenai korporatisasi pemberdayaan perempuan. Ulasan (Brooks, 2018) terhadap karya Moeller tentang kapitalisme, feminisme, dan politik pembangunan korporasi, menunjukkan pentingnya melihat secara kritis bagaimana agenda pemberdayaan perempuan dapat ditempatkan dalam logika pembangunan yang tetap berorientasi pada kepentingan korporasi. Dalam kerangka tersebut, perempuan dapat

diposisikan sebagai subjek pemberdayaan sekaligus sebagai instrumen bagi ekspansi ekonomi, sehingga bahasa emansipasi tidak selalu identik dengan perubahan terhadap struktur ketimpangan.

Dalam konteks Indonesia, persoalan tersebut menjadi penting karena banyak perempuan entrepreneur berada dalam skala usaha kecil dan menghadapi keterbatasan sumber daya. Transformasi digital memang membuka peluang baru, tetapi (Susanti et al., 2023) menunjukkan bahwa digitalisasi tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan kinerja tanpa dukungan inovasi dan keunggulan kompetitif. Dengan demikian, kemampuan individual perempuan saja tidak cukup untuk mengatasi hambatan struktural.

Lebih jauh, entrepreneurship dapat menciptakan bentuk baru beban ganda. Perempuan dapat bekerja dari rumah, menjalankan usaha digital, mengelola UMKM, sekaligus tetap menjalankan pekerjaan domestik. Batas antara ruang kerja dan ruang rumah menjadi semakin kabur. Dalam kondisi demikian, fleksibilitas yang semula dianggap sebagai keuntungan dapat berubah menjadi mekanisme yang memungkinkan pekerjaan produktif dan reproduktif berlangsung secara bersamaan tanpa redistribusi tanggung jawab.

Karena itu, entrepreneurship perempuan perlu dipahami secara kritis. Kewirausahaan memang dapat menjadi sarana emansipasi ekonomi, tetapi emansipasi tersebut akan terbatas apabila perempuan hanya diberi akses terhadap pasar tanpa diberikan dukungan untuk mengubah kondisi sosial yang membatasi kemampuan mereka. Pemberdayaan yang substantif membutuhkan kombinasi antara akses ekonomi, perlindungan sosial, infrastruktur care economy, akses terhadap teknologi dan modal, serta perubahan norma mengenai pembagian kerja domestik.

Paradoks Kapitalisme dan Kesetaraan Gender di Indonesia

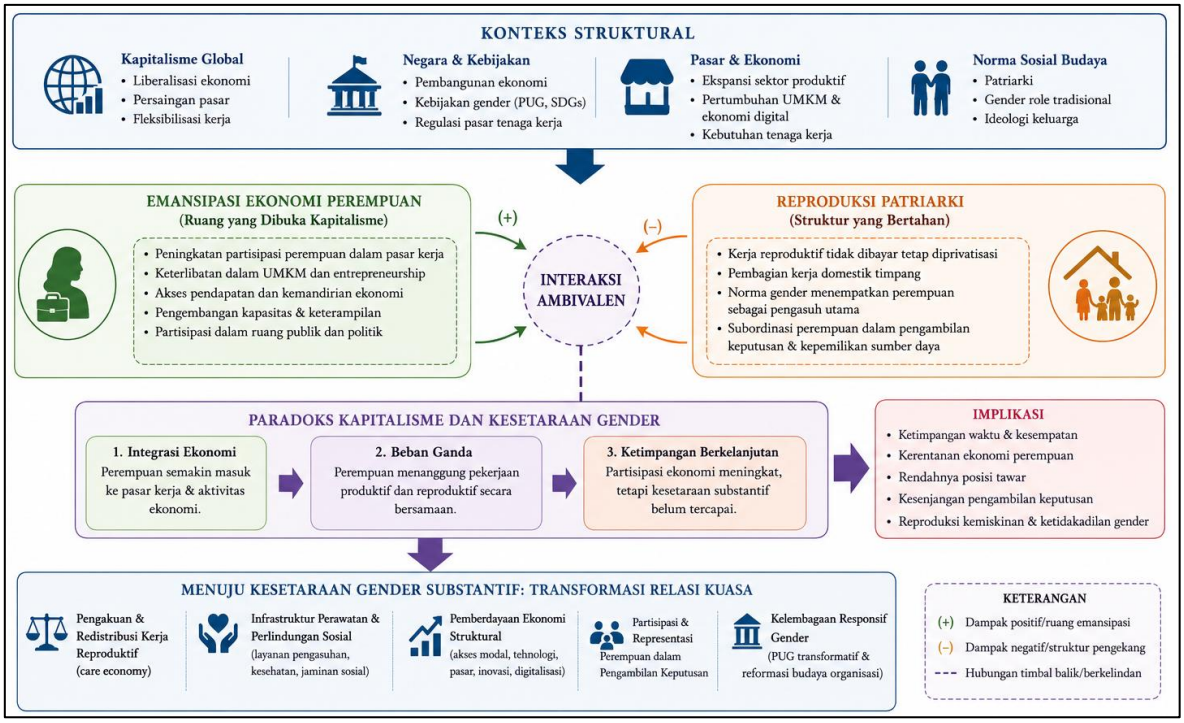
Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa hubungan antara kapitalisme dan kesetaraan gender di Indonesia bersifat ambivalen. Di satu sisi, perkembangan ekonomi membuka ruang yang semakin luas bagi perempuan untuk memasuki pasar kerja, menjalankan usaha, memperoleh pendapatan, dan berpartisipasi dalam ruang publik. Perempuan dengan demikian memperoleh peluang yang lebih besar untuk membangun kemandirian ekonomi dan memperluas kapasitas sosialnya. Di sisi lain, integrasi perempuan ke dalam aktivitas ekonomi belum secara otomatis mengubah pembagian kerja berbasis gender di dalam rumah tangga maupun relasi kuasa yang lebih luas. Perempuan dapat memasuki ruang produktif tanpa sepenuhnya meninggalkan tanggung jawab reproduktif yang secara sosial masih dilekatkan kepada mereka. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa emansipasi ekonomi dan kesetaraan gender merupakan dua proses yang berkaitan, tetapi tidak selalu berjalan dalam arah yang sama.

Ambivalensi tersebut dapat dijelaskan melalui keterkaitan antara kapitalisme, kerja reproduktif, dan struktur patriarki. Menurut (Acker, 2004), gender merupakan bagian yang melekat dalam struktur kapitalisme dan organisasi ekonomi, sehingga pasar kerja tidak dapat dipandang sebagai ruang yang sepenuhnya netral terhadap relasi gender. Sementara itu, pandangan (Boris & Swinth, 2023) menunjukkan pentingnya rumah tangga dalam memahami sejarah sosial kapitalisme. Rumah tangga bukan sekadar ruang privat yang berada di luar ekonomi, tetapi merupakan ruang tempat berlangsungnya berbagai aktivitas yang memungkinkan reproduksi sosial dan keberlanjutan kehidupan ekonomi. Dengan perspektif tersebut, kerja domestik dan kerja perawatan memiliki fungsi ekonomi yang penting meskipun sebagian besar tidak memperoleh pengakuan dan kompensasi sebagaimana kerja yang berlangsung di pasar.

Dalam konteks Indonesia, ambivalensi tersebut dapat dilihat melalui tiga proses yang berlangsung secara simultan. **Pertama, integrasi ekonomi perempuan** semakin berkembang melalui pekerjaan formal dan informal, UMKM, entrepreneurship, serta ekonomi digital. Berbagai

penelitian oleh (Firmansyah & Sihaloho, 2021; Setyaningrum et al., 2023; Sulisto et al., 2023) menunjukkan bahwa pemberdayaan dan partisipasi ekonomi perempuan memiliki kontribusi positif terhadap aktivitas dan pertumbuhan ekonomi. **Kedua, kerja reproduktif tetap banyak diprivatisasi dalam rumah tangga**, sementara norma sosial masih menempatkan perempuan sebagai pengasuh utama keluarga (Cameron, 2023). **Ketiga, pembagian kerja tersebut dapat mereproduksi patriarki**, ketika peningkatan tanggung jawab produktif perempuan tidak diikuti dengan redistribusi tanggung jawab domestik, perlindungan sosial, dan kekuasaan pengambilan keputusan. Pengalaman perempuan selama pandemi COVID-19 memperlihatkan secara jelas bagaimana peningkatan tekanan ekonomi dapat berlangsung bersamaan dengan meningkatnya tanggung jawab domestik dan perawatan (Miranti et al., 2022). Hubungan ketiga proses tersebut dapat dirumuskan dalam kerangka konseptual pada Gambar 1.

Gambar 1. Kerangka Konseptual: Kapitalisme, Emansipasi Ekonomi, dan Reproduksi Patriarki di Indonesia



Sumber: Diadaptasi dan dikembangkan dari (Acker, 2004; Boris & Swinth, 2023; Cameron, 2023; Cornwall & Rivas, 2015; Dahlum et al., 2022; Eko Hartono & Khalwani, 2022; Miranti et al., 2022; Setyaningrum et al., 2023; Susanti et al., 2023; Syukri, 2023).

Gambar 1 menunjukkan bahwa emansipasi ekonomi perempuan dan reproduksi patriarki tidak berlangsung sebagai dua proses yang saling meniadakan, tetapi dapat berlangsung secara bersamaan dalam struktur ekonomi politik yang sama. Kapitalisme, kebijakan negara, mekanisme pasar, dan norma sosial budaya menciptakan ruang bagi perempuan untuk memasuki aktivitas produktif. Perluasan tersebut menghasilkan peningkatan akses terhadap pendapatan, entrepreneurship, UMKM, keterampilan, dan ruang publik. Namun, ruang ekonomi tersebut berinteraksi dengan struktur domestik yang masih memprivatisasi kerja reproduktif dan menempatkan perempuan sebagai pengasuh utama. Dengan demikian, perempuan dapat

memperoleh peluang baru di ruang publik tanpa memperoleh redistribusi tanggung jawab yang setara di ruang domestik.

Interaksi tersebut menghasilkan apa yang dapat disebut sebagai **paradoks kapitalisme dan kesetaraan gender**. Semakin besar tuntutan terhadap partisipasi produktif perempuan, semakin penting pula persoalan siapa yang menanggung pekerjaan reproduktif yang memungkinkan aktivitas produktif tersebut berlangsung. Apabila kerja pengasuhan, pekerjaan rumah tangga, dan perawatan tetap dipandang sebagai tanggung jawab privat perempuan, maka peningkatan partisipasi ekonomi dapat menghasilkan perluasan beban, bukan semata-mata perluasan kebebasan. Perempuan pada akhirnya berada dalam dua ruang kerja sekaligus: ruang pasar yang menuntut produktivitas dan ruang rumah tangga yang menuntut reproduksi sosial.

Paradoks tersebut menunjukkan bahwa persoalan kesetaraan gender tidak cukup dipahami melalui indikator partisipasi ekonomi. Peningkatan jumlah perempuan yang bekerja atau memiliki usaha memang merupakan indikator penting dari emansipasi ekonomi, tetapi belum dapat digunakan sebagai bukti bahwa relasi gender telah menjadi setara. Kesetaraan substantif juga ditentukan oleh distribusi waktu, pendapatan, akses terhadap sumber daya, perlindungan sosial, tanggung jawab perawatan, dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Sebagaimana yang ditekankan oleh (Cornwall & Rivas, 2015), pemberdayaan perempuan kehilangan daya transformatif apabila hanya diterjemahkan sebagai peningkatan produktivitas dan integrasi ke dalam pasar.

Persoalan tersebut juga menjelaskan keterbatasan pendekatan pemberdayaan ekonomi yang terlalu berorientasi individual. Entrepreneurship dan UMKM dapat menjadi sarana penting bagi perempuan untuk memperoleh kemandirian ekonomi, tetapi tidak selalu mengubah struktur yang membatasi akses mereka terhadap modal, teknologi, pasar, maupun posisi tawar (Setyaningrum et al., 2023; Susanti et al., 2023). Bahkan, fleksibilitas kerja berbasis rumah dapat menghasilkan situasi ketika pekerjaan produktif dan reproduktif berlangsung secara bersamaan dalam ruang yang sama. Dalam kondisi demikian, perempuan memperoleh akses terhadap aktivitas ekonomi, tetapi batas antara waktu kerja dan waktu domestik menjadi semakin kabur.

Dari perspektif politik pembangunan, paradoks tersebut juga terlihat dalam hubungan antara kebijakan negara dan transformasi gender. Indonesia telah mengembangkan Pengarusutamaan Gender dan berbagai kebijakan pemberdayaan perempuan, tetapi implementasinya masih menghadapi hambatan kelembagaan dan budaya organisasi (Eko Hartono & Khalwani, 2022). Pada tingkat pembangunan desa, orientasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan belum selalu diikuti perubahan mendasar dalam relasi gender (Syukri, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang meningkatkan partisipasi perempuan dapat menghasilkan perubahan pada tingkat akses, tetapi belum tentu menghasilkan perubahan pada tingkat struktur dan kekuasaan.

Dengan demikian, reproduksi patriarki dalam konteks kapitalisme tidak harus dipahami sebagai sesuatu yang sepenuhnya berada di luar sistem ekonomi. Sebaliknya, pembagian kerja patriarkal dapat berinteraksi dengan mekanisme ekonomi ketika biaya reproduksi sosial sebagian besar dipikul oleh rumah tangga dan secara tidak proporsional dibebankan kepada perempuan. Dalam kondisi tersebut, kerja reproduktif yang tidak dibayar menjadi fondasi tersembunyi bagi keberlangsungan kerja produktif. Argumen ini sejalan dengan perspektif (Acker, 2004) mengenai keterkaitan antara kapitalisme dan struktur gender serta pandangan (Boris & Swinth, 2023) mengenai posisi rumah tangga dalam reproduksi sosial kapitalisme.

Oleh karena itu, temuan konseptual utama tulisan ini adalah bahwa **kapitalisme memiliki karakter ambivalen terhadap emansipasi perempuan**. Kapitalisme membuka ruang bagi

perempuan untuk memasuki pasar, memperoleh pendapatan, membangun usaha, dan memperluas partisipasi publik; tetapi ruang tersebut tidak dengan sendirinya membongkar pembagian kerja patriarkal. Emansipasi ekonomi dapat berjalan bersamaan dengan reproduksi patriarki ketika akses perempuan terhadap aktivitas produktif tidak disertai redistribusi kerja reproduktif dan transformasi relasi kuasa. Dengan kata lain, **integrasi perempuan ke dalam pasar bukanlah tujuan akhir kesetaraan gender, melainkan salah satu prasyarat yang harus diikuti transformasi struktural**.

Proposisi tersebut menjadi dasar bagi pembahasan selanjutnya bahwa kesetaraan gender substantif membutuhkan pergeseran dari sekadar ***women's economic inclusion*** menuju transformasi relasi kuasa. Transformasi tersebut mencakup pengakuan terhadap kerja reproduktif, redistribusi tanggung jawab perawatan, penguatan **care economy,** perlindungan sosial, akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi, serta peningkatan representasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, ukuran keberhasilan politik kesetaraan gender tidak lagi hanya terletak pada seberapa banyak perempuan masuk ke dalam ekonomi, tetapi juga pada sejauh mana struktur ekonomi dan sosial mampu memastikan bahwa emansipasi ekonomi tidak dibangun di atas reproduksi ketidaksetaraan gender.

Menuju Kesetaraan Gender Substantif: Dari Integrasi Pasar ke Transformasi Relasi Kuasa

Temuan kajian ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender substantif membutuhkan perubahan paradigma. Kajian (Blackett, 2024) menunjukkan bahwa pendekatan feminis yang tampak emansipatoris tetap dapat mengandung ambivalensi ketika pengalaman perempuan dibaca melalui kerangka yang mengabaikan sejarah kolonial dan relasi kekuasaan. Hal ini mengingatkan bahwa transformasi gender tidak cukup hanya dengan memperluas akses perempuan terhadap ruang ekonomi, tetapi juga membutuhkan perhatian terhadap konteks sosial dan epistemik yang membentuk pengalaman serta posisi perempuan. Dalam konteks yang berbeda, analisis oleh (Elliott, 2024) memperlihatkan pentingnya membaca kembali pengetahuan dan narasi perempuan Indigenous melalui konteks budaya dan sejarahnya sendiri, bukan semata-mata melalui kategori pengetahuan yang dibentuk dari luar komunitas. Kedua perspektif tersebut memperkuat argumen bahwa kesetaraan gender substantif membutuhkan pendekatan yang sensitif terhadap konteks, sejarah, dan relasi kekuasaan.

Pertama, kerja reproduktif perlu memperoleh pengakuan sebagai bagian penting dari ekonomi dan keberlangsungan pembangunan. Selama kerja pengasuhan, pekerjaan rumah tangga, dan perawatan dipandang sebagai urusan privat perempuan, kontribusi tersebut akan tetap tidak terlihat dalam sistem ekonomi. Pengakuan tersebut tidak berarti seluruh kerja reproduktif harus dikomersialisasikan, tetapi membutuhkan kebijakan yang mengakui nilai sosial dan ekonomi dari kerja perawatan serta mendistribusikan tanggung jawabnya secara lebih adil.

Kedua, pembangunan *care economy* menjadi bagian penting dari agenda kesetaraan gender. Infrastruktur pengasuhan anak, layanan perawatan, perlindungan sosial, dan kebijakan kerja yang fleksibel dapat mengurangi beban reproduktif yang secara tidak proporsional ditanggung perempuan. Dengan demikian, negara tidak hanya berperan sebagai regulator pasar tenaga kerja, tetapi juga sebagai aktor yang ikut menanggung biaya reproduksi sosial.

Ketiga, kebijakan pemberdayaan ekonomi perlu bergerak dari pendekatan individualistik menuju pendekatan struktural. Program UMKM dan entrepreneurship tetap penting, tetapi harus disertai akses terhadap modal, teknologi, pasar, jaringan, perlindungan sosial, dan dukungan perawatan. Dengan demikian, perempuan tidak hanya didorong untuk menjadi lebih produktif, tetapi juga memperoleh lingkungan kelembagaan yang memungkinkan produktivitas tersebut menghasilkan peningkatan posisi tawar.

Keempat, transformasi kesetaraan gender membutuhkan perubahan dalam relasi kekuasaan. Temuan (Dahlum et al., 2022) menunjukkan pentingnya pemberdayaan politik perempuan bagi pembangunan ekonomi. Karena itu, keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan perlu dilihat sebagai bagian dari transformasi ekonomi-politik, bukan sekadar persoalan representasi. Perempuan harus memiliki kapasitas untuk memengaruhi kebijakan mengenai pekerjaan, perlindungan sosial, pengasuhan, ekonomi, dan pembangunan.

Kelima, pengarusutamaan gender perlu bergerak dari kepatuhan administratif menuju transformasi kelembagaan. Pengalaman implementasi PUG di Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan formal dapat berkembang, tetapi hambatan budaya organisasi dan kapasitas kelembagaan masih menjadi persoalan (Eko Hartono & Khalwani, 2022). Karena itu, keberhasilan PUG tidak cukup diukur dari keberadaan dokumen, program, atau indikator gender, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut mengubah distribusi sumber daya, kesempatan, dan kekuasaan.

Dengan demikian, kesetaraan gender substantif dapat dipahami sebagai kondisi ketika **emansipasi ekonomi perempuan tidak lagi dibangun di atas reproduksi ketimpangan domestik.** Emansipasi tidak berhenti pada kemampuan perempuan untuk masuk ke pasar, tetapi mencakup kemampuan untuk menentukan pilihan ekonomi, memperoleh perlindungan yang setara, memiliki akses terhadap sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta terbebas dari pembagian kerja reproduktif yang tidak adil.

Sintesis tersebut menghasilkan proposisi utama penelitian ini, **kapitalisme dapat menjadi ruang emansipasi ekonomi perempuan sekaligus menjadi arena reproduksi ketimpangan gender ketika perluasan akses perempuan terhadap pasar tidak disertai transformasi pembagian kerja reproduktif dan relasi kuasa patriarkal.** Oleh karena itu, politik kesetaraan gender di Indonesia perlu bergerak dari paradigma ***women's economic inclusion*** menuju ***gender-transformative political economy***, yaitu pendekatan yang tidak hanya memperluas partisipasi perempuan dalam ekonomi, tetapi juga mengubah struktur sosial, kelembagaan, dan distribusi tanggung jawab yang selama ini menghasilkan ketimpangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa hubungan antara kapitalisme dan kesetaraan gender di Indonesia bersifat ambivalen. Kapitalisme membuka ruang bagi emansipasi ekonomi perempuan melalui pasar kerja, UMKM, kewirausahaan, ekonomi digital, dan ruang publik. Namun, perluasan partisipasi tersebut belum otomatis menghasilkan kesetaraan gender substantif karena perempuan masih menghadapi pembagian kerja reproduktif yang tidak setara dan beban ganda antara kerja produktif dan domestik.

Paradoks tersebut menunjukkan bahwa integrasi perempuan ke dalam pasar dapat berlangsung bersamaan dengan reproduksi patriarki. Kerja reproduktif yang tidak dibayar tetap menjadi bagian penting dari keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi, sementara politik pemberdayaan yang terlalu berorientasi pada peningkatan produktivitas berisiko membatasi kesetaraan pada dimensi ekonomi. Dengan demikian, partisipasi ekonomi, kepemilikan usaha, dan peningkatan pendapatan merupakan bagian dari emansipasi, tetapi bukan ukuran tunggal kesetaraan gender.

Kesetaraan gender substantif karena itu membutuhkan transformasi yang lebih luas terhadap distribusi sumber daya, waktu, tanggung jawab reproduktif, perlindungan sosial, dan kekuasaan. Politik kesetaraan gender perlu bergerak dari sekadar women's economic inclusion menuju pendekatan transformatif yang mengakui kerja reproduktif, memperkuat care economy,

melindungi pekerja perempuan, memperluas akses terhadap sumber daya ekonomi, dan meningkatkan posisi perempuan dalam pengambilan keputusan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa langkah perlu diperkuat. Pertama, pemerintah perlu mengintegrasikan care economy, layanan pengasuhan dan perawatan, perlindungan sosial, serta kebijakan kerja yang responsif terhadap tanggung jawab keluarga ke dalam kebijakan pembangunan.

Kedua, pemberdayaan ekonomi perempuan melalui UMKM, kewirausahaan, dan ekonomi digital perlu diarahkan pada penguatan posisi tawar, bukan sekadar peningkatan produktivitas, melalui akses terhadap modal, teknologi, pasar, jaringan usaha, dan perlindungan sosial.

Ketiga, Pengarusutamaan Gender perlu dikembangkan dari instrumen administratif menjadi instrumen transformasi kelembagaan dengan mengukur perubahan dalam distribusi sumber daya, kesempatan, tanggung jawab, dan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki.

Keempat, penelitian selanjutnya perlu menguji secara empiris hubungan antara kapitalisme, kerja reproduktif, dan kesetaraan gender melalui kajian mengenai penggunaan waktu, kesenjangan pendapatan, partisipasi kerja, distribusi kerja perawatan, serta pengalaman perempuan pekerja dan entrepreneur.

DAFTAR PUSTAKA

Acker, J. (2004). Gender, Capitalism and Globalization. *Critical Sociology*, *30*(1), 17–41. https://doi.org/10.1163/156916304322981668

Bieler, A., & Morton, A. D. (2025). The dialectical matrix of class, gender, race. *Environment and Planning F*, *4*(3), 294–314. https://doi.org/10.1177/26349825241241303

Blackett, E. (2024). Blue Crush Cinema: Oceanic Feeling and Settler-Colonial Women. *Environmental Humanities*, *16*(1), 19–35. https://doi.org/10.1215/22011919-10943089

Boris, E., & Swinth, K. (2023). Household Matters: Engendering the Social History of Capitalism. *International Review of Social History*, *68*(3), 483–506. https://doi.org/10.1017/S0020859023000408

BPS. (2025). *Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Agustus 2025*. Badan Pusat Statistik.

Brooks, S. (2018). The gender effect: capitalism, feminism, and the corporate politics of development. *Gender and Education*, *30*(8), 1098–1099. https://doi.org/10.1080/09540253.2018.1501007

Cameron, L. (2023). Gender Equality and Development: Indonesia in a Global Context. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *59*(2), 179–207. https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2229476

Cornwall, A., & Rivas, A.-M. (2015). From 'gender equality and 'women's empowerment' to global justice: reclaiming a transformative agenda for gender and development. *Third World Quarterly*, *36*(2), 396–415. https://doi.org/10.1080/01436597.2015.1013341

Dahlum, S., Knutsen, C. H., & Mechkova, V. (2022). Women's political empowerment and economic growth. *World Development*, *156*, 105822. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.105822

Eko Hartono, E., & Khalwani, K. M. (2022). Inovasi dan Tantangan Pengarusutamaan Gender di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. *Jurnal Perempuan*, *27*(1), 1–14. https://doi.org/10.34309/jp.v27i1.656

Elliott, J. (2024). Reading the Sun: Indigenous Rock Art and Changing Woman's Perpetual Story.

Environmental Humanities, *16*(1), 201–210. https://doi.org/10.1215/22011919-10943161

Firmansyah, C. A., & Sihaloho, E. D. (2021). The Effects of Women Empowerment on Indonesia's Regional Economic Growth. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 12–21. https://doi.org/10.23917/jep.v22i1.11298

Miranti, R., Sulistyaningrum, E., & Mulyaningsih, T. (2022). Women's Roles in the Indonesian Economy during the COVID-19 Pandemic: Understanding the Challenges and Opportunities. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *58*(2), 109–139. https://doi.org/10.1080/00074918.2022.2105681

Roberts, A., & Mir Zulfiqar, G. (2019). The political economy of women's entrepreneurship initiatives in Pakistan: reflections on gender, class, and "development." *Review of International Political Economy*, *26*(3), 410–435. https://doi.org/10.1080/09692290.2018.1554538

Setyaningrum, R. P., Norisanti, N., Fahlevi, M., Aljuaid, M., & Grabowska, S. (2023). Women and entrepreneurship for economic growth in Indonesia. *Frontiers in Psychology*, *13*. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.975709

Siscawati, M., Adelina, S., Eveline, R., & Anggriani, S. (2020). Gender Equality and Women Empowerment in The National Development of Indonesia. *Journal of Strategic and Global Studies*, *2*(2). https://doi.org/10.7454/jsgs.v2i2.1021

Sulisto, D., Nurhayati, N., Syafri, S., Purba, S. F., & Aritonang, K. B. (2023). Does Women's Role Have an Influence on Economy Growth in Indonesia? *Economics Development Analysis Journal*, *12*(3), 281–292. https://doi.org/10.15294/edaj.v12i3.67081

Susanti, E., Mulyanti, R. Y., & Wati, L. N. (2023). MSMEs performance and competitive advantage: Evidence from women's MSMEs in Indonesia. *Cogent Business & Management*, *10*(2). https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2239423

Syukri, M. (2023). Gender Policies of the new Developmental State: The Case of Indonesian new Participatory Village Governance. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, *42*(1), 110–133. https://doi.org/10.1177/18681034221149750

Tambunan, T. (2019). Recent evidence of the development of micro, small and medium enterprises in Indonesia. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, *9*(1), 18. https://doi.org/10.1186/s40497-018-0140-4

Yunara, E., Yeni, I., & Irfan, M. (2023). Pengaruh Pemberdayaan Perempuan Dalam Ekonomi Dan Politik Terhadap Pembangunan Perempuan di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, *5*(2). https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/epb/article/view/14862/5603